**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2001), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Dari beberapa pengertian Pendapatan Asli Daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan daerah yang sangat penting bagi daerah tersebut khususnya untuk menciptakan kemakmuran dan kesehjateraan terhadap masyarakat berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan. Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai alat ukur untuk melihat bagaimana keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah.

 Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, masing-masing daerah berusaha meningkatkan pendapatannya dengan cara mengenali potensi dan sumber daya yang dimiliki. Untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut, difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan biaya pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 Soleh dan Rochmansjah (2010) menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks ekonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil, sedangkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil. Bagi pemerintah daerah, bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam menjalankan kewenangannya dan seharusnya menjadi sumber pendanaan dalam membiayai belanja daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 telah diatur bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menaikkan kapasitas fiskal selain melalui Dana Bagi Hasil Pajak dengan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah.

 Masalah keuangan daerah timbul karena adanya keterbatasan dana yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah sebagaimana yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk membangun daerahnya (Widyoworo, 2003). Untuk tahun 2008-2013, Kota Padang dan Kota Bukittinggi juga mengalami naik turun dalam hal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Tidak tercapainya target atau anggaran yang telah ditentukan sebelumnya merupakan salah satu penyebab naik turunnya jumlah pendapatan asli daerah tersebut. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Data Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi**

**Tahun 2008-2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Kota Padang | Kota Bukittinggi |
| Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 2008 | 128.469.134.954 | 117.866.279.170 | 92 | 27.690.611.668 | 33.828.542.850 | 122 |
| 2009 | 133. 164.556.383 | 113.268.654.182 | 85 | 33.735.547.657 | 37.727.704.493 | 112 |
| 2010 | 120.926.262.741 | 116.435.656.590 | 96 | 42.193.150.511 | 33.847.174.752 | 80 |
| 2011 | 164.935.233.893 | 150.357.106.006 | 91 | 45.023.938.692 | 42.223.418.002 | 94 |
| 2012 | 187.627.806.661 | 189.450.840.075 | 101 | 49.310.208.409 | 45.076.555.841 | 91 |
| 2013 | 238.889.759.534 | 238.871.896.576 | 100 | 54.646.355.950 | 55.203.591.605 | 101 |

*Sumber : DPKA Kota Padang dan DPKAD Kota Bukittinggi*

 Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan jumlah produk barang dan jasa yang diukur dalam Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah. Menurut Todaro (2003) dalam Pamungkas (2013), ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga komponen tersebut adalah: (1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia (2) pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, dan (3) kemajuan teknologi.

 Menurut Susanto (2014), PDRB tidak lepas dari tiga pendekatan yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran, jika dilihat dari segi produksi terdapat 9 sektor ekonomi yaitu (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air bersih, (5) bangunan/konstruksi, (6) perdagangan, hotel, dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa. PDRB menurut harga konstan secara regional atau daerah telah ditetapkan 9 subsektor yang merupakan penggerak ekonomi. Semakin meningkatnya PDRB menurut harga konstan pertahunnya maka perkembangan ekonomi semakin baik dan peran masyarakat untuk membayar pendapatan daerah juga semakin meningkat.

 PDRB juga merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan pendapatan daerah karena dari PDRB, pemerintah juga dapat mengukur upaya yang telah disosialisasikan kepada oknum-oknum serta masyarakat apakah sudah memberikan kemajuan atau tidak. PDRB juga mencerminkan bagaimana kemampuan produksi dan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Dilihat dari keadaan pengeluaran konsumen di daerah sekarang ini, pendapatan masyarakat akan menjadi pengeluaran yang mampu mempengaruhi pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

 Menurut Najiah (2013), angka-angka PDRB dapat dihitung dengan 3 pendekatan: (1) Pendekatan produksi merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi barang dan jasa akhir yang didapatkan dari berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu; (2) Pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yaitu satu tahun; (3) Pendekatan pengeluaran merupakan satu cara pendekatan untuk mengetahui nilai PDRB dengan melihat sisi pengeluarannya.

 Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas 4 sumber, yaitu: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi daerah merupakan salah satu pungutan terhadap jasa-jasa yang dilakukan pemerintah daerah guna membangun dan meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi daerah juga berperan besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi biaya penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pertokoan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi terminal, serta retribusi izin mendirikan bangunan.

 Bagi Kota Padang dan Bukittinggi ada beberapa jenis retribusi yang menjadi penyumbang terbesar untuk peningkatan pendapatan asli daerah yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pendidikan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi izin mendirikan bangunan. Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota pendidikan harusnya mampu untuk memanfaatkan retribusi yang didapat setiap tahunnya dalam peningkatan pendapatan daerah, walaupun saat ini sudah membaik, hendaknya dari retribusi tersebut pemerintah Bukittinggi lebih mampu lagi dalam mengelola retribusi daerah tersebut. Sedangkan untuk Kota Padang sendiri, dengan pemerintahan yang baru, sebaiknya lebih mampu lagi dalam pemanfaatan retribusi daerah yang didapat dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

 Jumlah penduduk di Kota Padang dan Kota Bukittinggi terdiri dari penduduk asli, penduduk pendatang menetap, serta penduduk menetap sementara, dan tidak terkecuali para wisatawan juga sangat mempengaruhi pendapatan daerah dalam pembangunannya. Pada suatu daerah, penduduk yang memiliki pola pikir perencana pembangunan merupakan aset modal dasar dalam pembangunan tetapi juga merupakan beban dalam pembangunan. Sebagai aset modal dasar pembangunan serta mampu meningkatkan kualitas keahlian dan kemampuan akan mampu meningkatkan produksi nasional khususnya produksi daerah.

 Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Santosa dan Rahayu (2005) melakukan penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kediri. Dari hasil analisis regresi dalam penelitian Santosa dan Rahayu (2005) dikemukakan bahwa pengeluaran pembangunan, PDRB, dan jumlah penduduk terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kediri.

 Goma (2014) melakukan penelitian mengenai peran retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun objek dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

 Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Jaya dan Widanta (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Jaya dan Widanta, 2014) adalah penghapusan variabel jumlah wisatawan dan penambahan variabel retribusi daerah. Selain itu, populasi dalam penelitian ini juga berbeda, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi sedangkan populasi pada penelitian sebelumnya (Jaya dan Widanta, 2014) adalah Kota Denpasar. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang: **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Kota Bukittinggi tahun 2008-2013.”**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Bukittinggi pada tahun 2008-2013 ?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Bukittinggi pada tahun 2008-2013 ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Bukittinggi pada tahun 2008-2013 ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Bukittinggi pada tahun 2008-2013
2. Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Bukittinggi pada tahun 2008-2013
3. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Bukittinggi pada tahun 2008-2013

**1.4 Manfaat Penelitian**

 Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber informasi dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terhadap objek sejenis dan dapat memberikan tambahan literatur yang dapat membantu pengembangan dalam bidang akademik.

1. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperlihatkan bagaimana PDRB, retribusi daerah, dan jumlah penduduk dapat mempengaruhinya**.**

**1.5 Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, agar lebih teratur dan urutnya pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**

 Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah dan pengembangan hipotesis penelitian serta kerangka penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**

 Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Uraian yang disajikan meliputi; subjek penelitian, metode yang digunakan untuk memilih dan mengumpulkan data penelitian, pengukuran variabel serta metode statistik yang dilakukan untuk menganalisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

 Pada bab ini membahas tentang analisis deskripsi statistik sampel penelitian dan variabel-variabel penelitian serta pembahasan hasil olah data dan hipotesis penelitian.

**BAB V PENUTUP**

 Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data dan keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa mendatang.